

DAMPAK *FRAUD* PASCA PANDEMI *COVID 19*: BUKTI DI ASIA PASIFIK DAN INDONESIA

IMPACT OF FRAUD POST-PANDEMI COVID 19: EVIDENCE IN ASIA PACIFIC AND INDONESIA

Oleh:

Natalis Christian¹, Helen Febriana²

^{1,2}*Universitas Internasional Batam, Indonesia*

Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426

Email Koresponden: natalis.christian@uib.ac.id¹, 2042097.helen@uib.edu²

Sejarah Artikel: Diterima Mei 2023, Disetujui Mei 2023, Dipublikasikan Juni 2023

ABSTRAK

Pandemi *Covid-19* secara global dikhawatirkan menimbulkan terjadinya tindakan *fraud* yang berdampak buruk secara finansial maupun non-finansial. Penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak *fraud* secara finansial dan non-finansial antara Indonesia dan di Asia Pasifik pasca pandemic *Covid-19*. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kuantitatif dan metode studi kasus yang menggunakan data sekunder sebagai referensinya. Data sekunder yang digunakan berasal dari artikel lembaga pengawasan dan Kantor Akuntan Publik, *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan *Pricewaterhouse Coopers (PwC)*. Objek pada penelitian ini berupa kasus-kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia dan Asia Pasifik. Berdasarkan berbagai seluruh penelitian, kasus *fraud* baik Indonesia maupun Asia Pasifik yang juga dipicu oleh pengaruh pandemi *Covid-19* pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan meskipun potensi terjadinya korupsi di Indonesia mengalami peningkatan. Secara global, *fraud* diprediksi mengalami peningkatan yang dapat mengalami dampak buruk yang lebih besar baik secara finansial (kerugian uang) maupun secara non-finansial (rusaknya reputasi, ditindak secara hukum, dan sebagainya). Kajian yang dilakukan untuk mengkaji dampak dari *fraud* dari berbagai sumber dapat diterapkan sebagai bahan memperluas wawasan dan referensi bagi penelitian mendatang.

Kata Kunci: *Fraud*, Dampak *Fraud*, *Covid-19*, Perbandingan, Indonesia, Asia Pasifik.

ABSTRACT

The global *Covid-19* pandemic event is feared to cause *fraud* to occur which has a negative impact financially and non-financially. This study was conducted to see the financial and non-financial impact of *fraud* between Indonesia and the Asia Pacific after the *Covid-19* pandemic. This research was conducted using quantitative research and a case study method that uses secondary data as a reference. The secondary data used comes from articles from supervisory institutions and public accounting firms, the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Indonesia Corruption Watch (ICW), the Corruption Eradication Commission (KPK), and PricewaterhouseCoopers (PwC), and other sources. The object of this research is *fraud* cases that occurred in Indonesia and the Asia Pacific. Based on various studies, *fraud* cases in both Indonesia and the Asia Pacific, which were also triggered by the influence of the *Covid-19* pandemic in 2020-2022, have decreased even though the potential for corruption in Indonesia has increased. Globally, *fraud* is predicted to increase which can have a greater adverse impact both financially (loss of money) and non-financially (damage to reputation, legal action, and so on). Studies conducted to assess the impact of *fraud* from various sources can be applied as material to broaden insights and references for future research.

Keywords: *Fraud*, Impact of *Fraud*, *Covid-19*, Comparison, Indonesia, Asia Pacific.

PENDAHULUAN

Organisasi membutuhkan proses yang kuat untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi *fraud* dan korupsi yang didukung oleh pemahaman yang kuat tentang risiko (Mantinaf, 2020). Ini juga membutuhkan kerja sama antar organisasi di bawah semangat kolaborasi. *Fraud* dan praktik kontra *fraud*, berkembang sangat cepat dan organisasi harus gesit dan mengubah pendekatan mereka untuk menghadapi evolusi ini. Mencegah *fraud* membutuhkan lebih sedikit sumber daya daripada pendekatan yang berfokus pada deteksi dan pemulihan. Berdasarkan sumber dari *Black Law Dictionary*, *fraud* adalah berbagai cara yang dapat dirancang oleh kecerdikan manusia, dan yang digunakan oleh satu individu untuk mendapatkan keuntungan dari yang lain dengan saran yang salah atau kenyataan yang dipaksakan (Association of Certified *Fraud* Examiners, 2023).

Pada tahun 2020, ada berita heboh tentang virus yang menyerang sistem daya tahan tubuh manusia yang tinggal di belahan negara manapun di dunia. Virus ini berasal dari Wuhan, China dan sudah menyebar ke berbagai belahan dunia. Berdasarkan laporan *World Health Organization* (WHO), pada 18 April 2020, virus ini sudah menjangkiti 2.164.111 orang dan membunuh lebih dari 146.198 nyawa manusia serta sudah menyebar lebih dari 200 negara. Seiring terjadinya penyebaran virus, angka tersebut diperkirakan akan meningkat secara berlipat. Virus yang dinamakan dengan *Coronavirus Infection Disease 19* (*Covid-19*) menimbulkan kompleksitas dampak yang sangat besar dan merusakkan fondasi kehidupan negara dan bangsa (Nurohman, Aziz, & Fahmi, 2021). Pandemi *COVID-19* yang terjadi secara global mengakibatkan krisis ekonomi yang menciptakan kerentanan terhadap kasus baru dan peningkatan resiko terjadinya *fraud* di perusahaan (PricewaterhouseCoopers, 2022). Data yang dirilis oleh ACFE melalui *Report to The Nation on Occupational Fraud and Abuse* pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Australia, China, dan Indonesia menempati peringkat tertinggi diantara 18 negara lain yang berada di Asia Pasifik. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa terdapat 78 kasus *fraud* yang terjadi di Asia Pasifik yaitu sebesar 4% dari keseluruhan kasus yang ditemukan terjadi di Asia Pasifik. Terdapat 57% penipuan yang terjadi dalam pekerjaan (*occupational fraud*) di Asia Pasifik dilakukan dengan cara korupsi diikuti oleh

penyelewengan tagihan sebesar 20%, non-tunai 17%, dan penggantian biaya 15%.

Selain terjadinya kenaikan kasus *fraud* di Asia Pasifik, salah satu skandal yang terjadi di Indonesia terkait dengan *fraud* yaitu PT Asuransi Jiwasraya dengan potensi kerugian negara yang disebabkan oleh kasus ini mencapai Rp16,8 Triliun berdasarkan penyidikan atas berkas dari tahun 2008 hingga 2018 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Direktur utama jiwasraya pada masa itu, Asmawi Syam, mengatakan bahwa perseroan mengalami penunggakan pembayaran polis asuransi dikarenakan pengelolaan manajemen yang kurang baik (Warta Pemeriksa, 2020). Dari kasus ini, dapat disimpulkan bahwa *fraud* dapat membawa dampak negatif baik berupa kerugian finansial maupun menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perseroan.

Setelah berakhirnya masa pandemi *Covid-19* tidak akan menjamin masa depan yang menjanjikan. Tidak hanya berpengaruh terhadap ekonomi, semua masyarakat terpengaruh dan telah menyebabkan perubahan dramatis dalam cara bisnis bertindak dan perilaku konsumen (Agustin, 2021). *Fraud* tidak hanya bermanfaat bagi pelaku, tetapi juga berdampak buruk yang cukup fatal bagi pihak lain. Timbulnya keragaman dampak dari *fraud*, baik dari segi finansial maupun non-finansial (Christian & Ricardo, 2022). Oleh sebab itu, artikel ini akan membahas mengenai dampak *fraud* pasca pandemi *Covid-19*: Bukti di Asia Pasifik dan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus yang menggunakan data sekunder sebagai referensinya. Data sekunder yang digunakan berasal dari artikel lembaga pengawasan dan Kantor Akuntan Publik, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan *PricewaterhouseCoopers* (PwC). Penelitian berupa penelitian kualitatif yang mengumpulkan datanya melalui berbagai kajian literatur yang ada (Sugiyono, 2019). Objek dari penelitian ini adalah kasus-kasus *fraud* yang terjadi di wilayah Asia Pasifik dan Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memahami bahwa dampak total *fraud* dan bukan hanya kerugian finansial memungkinkan

badan publik untuk membuat keputusan yang lebih baik. Kerugian akibat *fraud* terdiri dari 2 macam yaitu kerugian finansial dan kerugian non finansial. Kerugian finansial lebih mudah diukur seperti biaya denda, biaya tanggapan perbaikan serta penalti. Sedangkan kerugian non-finansial lebih sulit diukur karena sulit untuk memperkirakan nilai kerugiannya seperti rusaknya hubungan bisnis akibat *fraud*, kerusakan merek, hilangnya moral karyawan, posisi pasar serta peluang pasar (Christian & Ricardo, 2022). Meskipun tidak selalu dapat diukur, seiring waktu dapat mengecilkan dampak jangka pendek dari kerugian finansial. Sangat penting bagi perusahaan untuk menghindari *fraud* secara praktek karena jika *fraud* terjadi, akan menimbulkan biaya yang sangat besar bagi perusahaan dalam menghadapi konsekuensi dari kecurangan tersebut (Mardianto & Tiono, 2019). Berdasarkan penelitian dari Kusumawardhani (2013) terdapat pembuktian bahwa pengawasan yang tidak efisien mempengaruhi kecurangan pelaporan keuangan karena perusahaan tidak memiliki unit pengawasan yang efisien sehingga menyebabkan resiko dikendalikan oleh satu manajemen, tanpa kontrol kompensasi, pengawasan dewan direksi dan komite audit atas laporan keuangan yang tidak efisien (Edi & Victoria, 2018).

Berikut beberapa dampak *fraud* yang bersumber dari International Public Sector *Fraud* Forum (2020) yang terdapat pada penelitian oleh Christian dan Veronica (2022).

1. Dampak Manusia (*Human Impact*)

Fraud dapat berefek pada penghancuran mental dan fisik korban mulai dari mengalami ketidakberuntungan, kerentanan dan ketidaksetaraan serta menimbulkan trauma yang berkepanjangan dan tidak terlupakan bagi para korban yang di mana pada beberapa kasus merenggut nyawa korban.

2. Dampak Hasil Pemerintahan (*Government Outcomes Impact*)

Fraud terhadap badan publik membahayakan kemampuan pemerintah dalam meraih hasil yang memuaskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Dampak Reputasi (*Reputational Impact*)

Reputasi, merek, dan moral karyawan memberi dampak paling besar terhadap kasus penipuan. Sulitnya menghitung biaya kerusakan tambahan itu dapat menyebabkan kerusakan karier dan kepercayaan dari investor, pemasok,

dan pelanggan itu harus menjadi perhatian nyata bagi organisasi.

4. Dampak Sistem Pemerintahan (*Government System Impact*)

Berdasarkan hasil penelitian dari *Association of Certified Fraud Examiners* (2012) bahwa *fraud* terhadap organisasi pemerintah berakibat berbahaya karena: mengurangi dana publik yang dapat memengaruhi daya beli pemerintah, hilangnya kepercayaan publik, rusaknya reputasi pejabat pemerintah serta penerima manfaat dapat kehilangan akses ke layanan dan dukungan yang diperlukan. Biaya penipuan pemerintah sulit diukur dalam situasi apapun karena berbagai alasan seperti sulit menganalisis data yang diperoleh.

5. Dampak Industri (*Industry Impact*)

Pelaku *fraud* atau *Fraudster* berpotensi melakukan kecurangan dan mengusir bisnis yang sah serta mempengaruhi kualitas pelayanan bisnis sah tersebut. Hal ini juga dapat mengakibatkan beban yang lebih besar pada badan amal dan layanan masyarakat yang berperan membantu korban terkena dampak penipuan terhadap badan publik.

6. Dampak Lingkungan (*Environmental Impact*)

Fraud terhadap badan publik dapat mengakibatkan menurunnya upaya pelestarian lingkungan seperti menurunkan kualitas dan biaya perbaikan lingkungan yang mengarah ke peningkatan polusi dan kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta peningkatan biaya pembersihan.

7. Dampak Keamanan (*Security Impact*)

Fraud terhadap badan publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan nasional negara serta memengaruhi kemampuan negara untuk mendapatkan dukungan internasional.

8. Dampak Finansial (*Financial Impact*)

Berdasarkan perkiraan internasional, badan publik umumnya kehilangan antara 0,5% sampai 5% dari pengeluaran mereka karena penipuan dan kerugian terkait. Sebagian besar penipuan tersembunyi tidak terdeteksi dan sulit untuk dikategorikan.

9. Dampak Bisnis (*Business Impact*)

Biaya bisnis untuk memerangi kecurangan terhadap program pemerintah sangat besar, luas, dan melewati kerugian finansial secara langsung. Biaya dapat terdiri atas biaya penilaian, deteksi, investigasi dan respons serta potensi restitusi. Selain itu, biaya selanjutnya

dapat berupa tinjauan program dan audit serta penguatan atau perancangan ulang program.

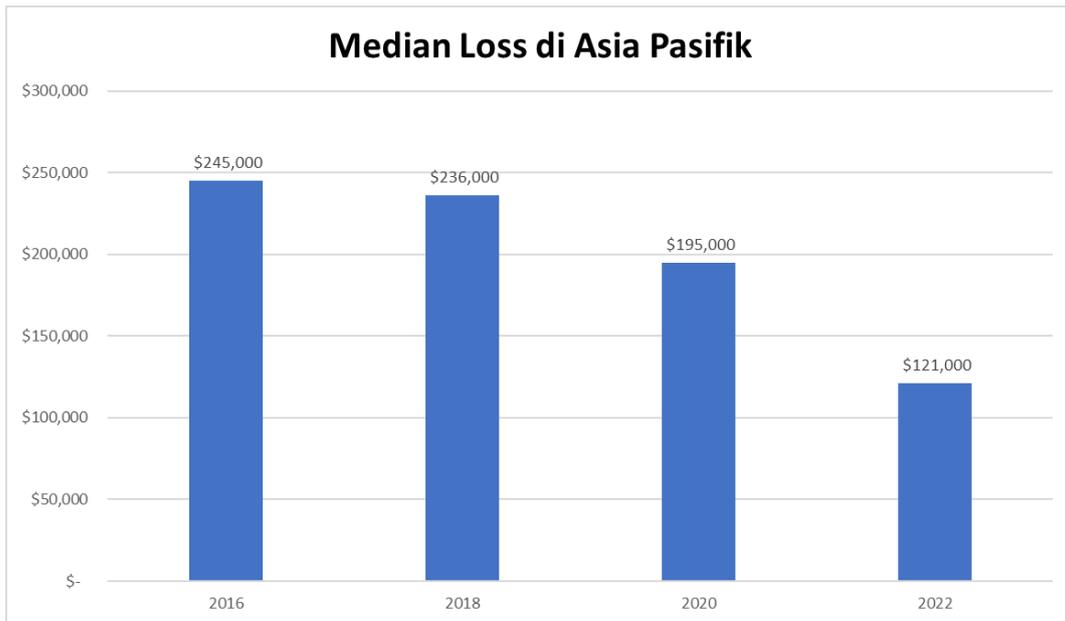
Penelitian oleh ACFE

Tabel 1:
Jumlah Kasus *Fraud* di Asia Pasifik

No.	Negara Asia Pasifik	Jumlah Kasus <i>Fraud</i>			
		2016	2018	2020	2022
1	American Samoa				2
2	Australia	26	38	29	38
3	Cambodia	1	2		
4	China	64	49	33	33
5	East Timor	2	1		
6	Hongkong		10	11	13
7	Fiji	2			1
8	Indonesia	42	29	36	23
9	Japan	3	4	8	
10	Laos	1		1	1
11	Macau		1	1	
12	Malaysia	11	14	19	25
13	Micronesia				1
14	Myanmar (Burma)		1	1	
15	New Zealand	10	8	3	6
16	Papua New Guinea		1		3
17	Philippines	29	25	24	12
18	Samoa	3			
19	Singapore	14	17	17	13
20	Solomon Islands	1			1
21	South Korea	3	6	5	2
22	Taiwan	3	6	2	3
23	Thailand	4	3	6	9
24	Vietnam	2	5	2	8
Jumlah		221	220	198	194

Kemudian timbulnya wabah pandemi *Covid-19* pada awal tahun 2020 berakibat pada banyak penutupan bisnis yang dipaksa dan pertama kalinya terjadi gangguan perdagangan sebagian besar bidang industri. Banyak perusahaan yang mengalami tantangan jangka pendek seperti kesehatan dan keselamatan, rantai pasokan, pekerja, arus kas, permintaan pelanggan, pendapatan, dan pemasaran (Agustin, 2021). Hal ini tentu terus menurunkan jumlah kasus terjadinya kasus *fraud* di Asia Pasifik pada tahun 2020 sebesar 198 kasus dan pada tahun 2022 sebesar 194 kasus. Indonesia secara keseluruhan mengalami penurunan jumlah kasus *fraud* sebelum terjadinya pandemi *Covid-19* dari tahun 2016 sebesar 42 kasus dan

tahun 2018 sebesar 29 kasus menjadi pada tahun 2020 sebesar 36 kasus dan tahun 2022 sebesar 23 kasus. Lalu China sebagai penyumbang jumlah kasus *fraud* terbesar di Asia Pasifik juga mengalami penurunan jumlah kasus *fraud* di Asia Pasifik dari tahun 2016 sebesar 64 kasus dan tahun 2018 sebesar 49 kasus menjadi pada tahun 2020 sebesar 33 kasus dan tahun 2022 sebesar 33 kasus. Secara keseluruhan, sebagian besar puluhan negara Asia Pasifik mengalami penurunan jumlah kasus *fraud* setelah terjadinya pandemi *Covid-19* kemudian terdapat beberapa negara lainnya yang tidak ada jumlah kasus *fraud* di tahun-tahun tertentu.



Sumber: 451 Alliance Survey Report (2022)

Gambar 1:
 Jumlah Kasus *Fraud* di Asia Pasifik

Sebelum terjadinya pandemi *Covid-19*, median (nilai tengah) dari kerugian akibat *fraud* di Asia Pasifik mengalami cukup penurunan dari tahun 2016 sebesar USD \$ 245.000 ke tahun 2018 sebesar USD \$195.000. Setelah terjadinya pandemi *Covid-19*, Asia Pasifik mengalami penurunan *median loss* yang sangat signifikan pada tahun 2020 sebesar USD \$195.000 dan tahun 2022 sebesar \$121.000. Hal ini selaras dengan terjadinya penurunan jumlah kasus *fraud* di Asia Pasifik yang berkontribusi terhadap penurunan *median loss* di Asia Pasifik.

Penelitian oleh 451 Alliance Survey Report



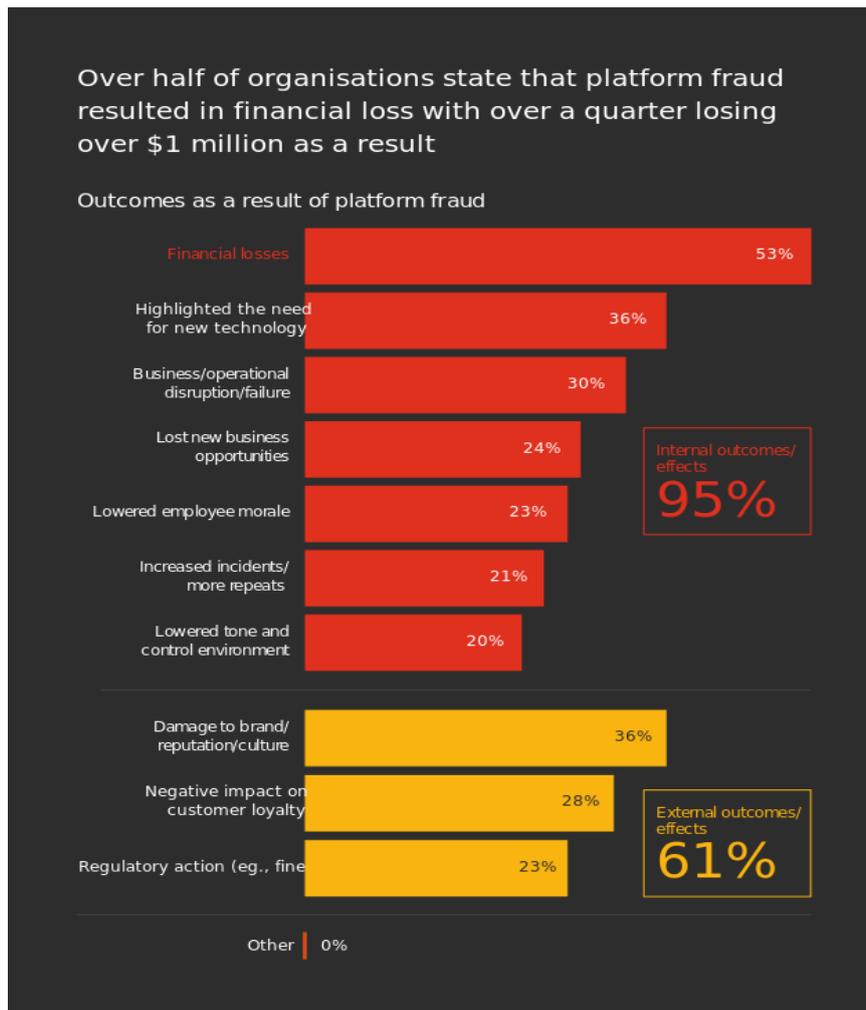
Sumber: 451 Alliance Survey Report (2022)

Grafik 2:
 Kekhawatiran Dampak *Fraud*

Berikut ini beberapa kekhawatiran yang muncul terhadap dampak *fraud* pada tahun 2020-2022 (Mckee, 2022):

1. Dampak Pengalaman Pelanggan (*Customer Experience Impact*). Meskipun langkah-langkah pencegahan dan kontrol *fraud* yang ketat dapat menurunkan kepalsuan transaksi beli namun dapat menghalangi pelanggan dalam melakukan transaksi beli secara nyaman. Hal ini menjadi masalah dalam menyeimbangkan antara keamanan dan kegunaan bagi perusahaan dan pelanggan. Hal ini terbukti tingkat kekhawatiran yang semakin meningkat pada tahun 2022 sebesar 53%.
2. Kesulitan Membangun Kepercayaan Bersama Pelanggan (*Difficulty Establishing Trust With Customers*). Kegagalan melindungi informasi pelanggan dapat menghadapi kesulitan dalam membangun kepercayaan. Tingkat kekhawatirannya cukup meningkat pada tahun 2022 sebesar 30%.
3. Kerusakan Merek/Reputasi (*Damage To Brand/Reputation*). Kegagalan membangun kepercayaan bersama pelanggan dapat mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada merek dan reputasi pedagang dengan tingkat kekhawatirannya yang sangat signifikan pada tahun 2022 sebesar 43%.
4. Biaya Manajemen *Fraud* (*Fraud Management Cost*). Teknologi *antifraud* yang terus diuji coba selama beberapa tahun terakhir dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dapat menimbulkan biaya yang besar dengan tingkat kekhawatiran yang cukup signifikan sebesar 42% pada tahun 2022.
5. Persyaratan Kepatuhan (*Compliance Requirement*). Beban operasional yang berasal dari *fraud* juga mencakup persyaratan kepatuhan. Persyaratan otentikasi pelanggan yang kuat yang diharuskan oleh PSD2 di Eropa, misalnya, telah mengakibatkan pergolakan total pada alur pembayaran untuk sebagian besar pedagang *online*.
6. Komitmen Sumber Daya (*Resource Commitment*). Upaya penggunaan sumber daya yang baik dapat terlihat dari mempekerjakan tim analis risiko yang cukup besar untuk menulis dan menyesuaikan aturan *fraud* dan menyelidiki penolakan bayar serta platform *fraud* yang berakar pada *Artificial Intelligence* (AI) dan pembelajaran mesin bersama dengan penawaran otomatisasi tolak bayar (Weeks & Mileski, 2013). Hal ini terlihat dari menurunnya tingkat kekhawatiran sebesar 31% pada tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 32%.
7. Dampak Tingkat Konversi (*Conversion Rate Impact*). Seringkali ada biaya peluang yang terkait dengan pencegahan penipuan yang berakibat membebani pembeli sah yang hendak melakukan transaksi dan membahayakan nilai seumur hidup pelanggan sehingga berakibat menurunnya jumlah pelanggan yang terealisasi melakukan pembelian dibandingkan keseluruhan pelanggan yang ada dengan tingkat kekhawatiran yang cukup signifikan sebesar 26% pada tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 24%.
8. Dampak Tingkat Otorisasi (*Authorization Rate Impact*). *Fraud* memberikan dampak buruk jangka panjang dalam pencapaian pendapatan perusahaan mulai dari lonjakan rasio tolak bayar atas persetujuan transaksi dari penerbit kartu serta keseluruhan penjualan perusahaan yang dicadangkan oleh bank pengakuisisi sebagai uang jaminan untuk menutupi potensi sengketa *fraud*. Hal ini terlihat dari meningkatnya tingkat kekhawatiran yang cukup signifikan sebesar 31% pada tahun 2022.
9. Tidak Ada Kekhawatiran Lain Yang Signifikan (*None Are Significant Concerns*). Dengan terdapat beberapa kekhawatiran yang signifikan sehingga terjadinya tingkat peningkatan tidak ada kekhawatiran lain yang signifikan sebesar 3% pada tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 2%.

Penelitian oleh PwC



Sumber: PricewaterhouseCoopers (2022)

Grafik 3:
Kekhawatiran Dampak *Fraud*

Menurut data PricewaterhouseCoopers, (2022), dampak *fraud* secara internal dapat berakibat kerugian finansial, mahal biaya kebutuhan teknologi baru yang terus beradaptasi, kegagalan operasional bisnis, kehilangan peluang bisnis, hilangnya moralitas karyawan, meningkat/berulangnya tindakan kejahatan, dan kontrol lingkungan yang lemah. Kemudian, dampak *fraud* secara eksternal dapat berakibat kerusakan reputasi, loyalitas pelanggan yang lebih rendah, dan terjadinya konsekuensi hukum yang terjadi. Sebanyak 51% responden mengalami penipuan selama dua tahun terakhir sejak merebaknya pandemi *COVID-19* sekitar awal tahun 2020. Ini adalah presentase tertinggi dalam 20 tahun penelitian *fraud* oleh PwC. Adanya tekanan lingkungan, geopolitik, keuangan dan sosial menciptakan lanskap risiko yang lebih tinggi dan tidak stabil

dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan semakin rumit untuk mencegah *fraud* atau kejahatan ekonomi lainnya meskipun tingkat penipuan dan kejahatan ekonomi dan keuangan stabil setelah meredanya pandemi *COVID-19*. Survei Kejahatan Ekonomi dan Penipuan Global 2022 PwC menunjukkan bahwa rata-rata organisasi kini mengoperasikan empat platform. Namun, survei terhadap 1.296 eksekutif di 53 negara dan wilayah juga menunjukkan bahwa penipu juga dengan cepat merespons peningkatan platform dan mengungkap setiap celah di sekelilingnya. *A low tone at the top* menunjukkan lingkungan kontrol yang lemah (Juliana, Johari, Said, & Wondabio, 2021). Lingkungan kontrol yang lemah menunjukkan bahwa elemen kontrol internal COSO lainnya seperti penilaian risiko, aktivitas kontrol, informasi & komunikasi, dan aktivitas

pemantauan tidak diterapkan secara efektif (Binus University, 2015).

Secara global, urutan teratas tipe *fraud* dengan rentang kerugian kurang dari US\$100 Juta hingga US\$10 Miliar didominasi oleh *CyberCrime*, diikuti oleh *customer fraud* dan *asset misappropriation*. Namun, terdapat penurunan penyalahgunaan aset yang dikarenakan adanya kebijakan bekerja dari rumah sehingga karyawan memiliki akses yang terbatas terhadap aset perusahaan. Sebanyak 70% dari korban *fraud* menyatakan bahwa *COVID-19* merupakan pemicu dari kasus *fraud* baru yang terjadi kepada mereka. Berbeda dengan hasil penelitian oleh ACFE bahwa jumlah kasus *fraud* mengalami penurunan signifikan sejak pandemi *COVID-19* dengan berfokus hanya di Asia Pasifik dan Indonesia.

Penelitian oleh ICW

COVID-19 yang pertama kali terdeteksi pada akhir tahun 2019 mendorong pemerintah untuk mengalokasikan dana pada bidang kesehatan. ICW mengkaji bahwa kerugian disebabkan oleh kasus korupsi yang terjadi dari tahun 2019 hingga 2020 merugikan negara hingga 70 triliun rupiah. Dari jumlah kerugian tersebut, hanya kurang dari Rp 21 triliun dari aset yang dicuri itu berhasil dikembalikan.

ICW menemukan 30 kasus korupsi terkait bantuan *COVID-19* antara 2020 dan 2021 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp22,4 Triliun dan nilai kerugian suap sebesar Rp23,4 Triliun. ICW menampilkan data bahwa korupsi di beberapa daerah tidak hanya terjadi pada pengalokasian dana untuk bansos, tetapi juga dalam pengadaan alat-alat kesehatan seperti masker, *rapidtest* kit, dan vaksin. Penyalahgunaan bantuan seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Tunai Tanpa Syarat Transfer (BLT) juga yang paling umum. Selain itu, bantuan operasional untuk keagamaan pendidikan seperti pesantren, madrasah, dan pusat pendidikan Alquran di bawah Kementerian Urusan Agama juga rawan korupsi (*Indonesia Corruption Watch*, 2021). Kasus-kasus ini sering dilakukan dengan modus penyalahgunaan anggaran dan pemotongan secara ilegal, paling tidak karena kurangnya pengawasan dan ketatnya pemerintahan kebijakan dalam pengaturan bantuan pendanaan *COVID-19*.

Penelitian oleh KPK

Terjadi peningkatan kasus korupsi di Indonesia ketika pandemi *COVID-19* mulai

masuk di Indonesia pada tahun 2020. Meningkatnya kasus korupsi ini disebabkan adanya celah pada program pemerintah memberikan dana bantuan sosial kepada masyarakat pasca pandemi *COVID-19* yang kemudian dijadikan kesempatan oleh para pelaku korupsi. Salah satunya adalah kasus penggelapan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh mantan menteri sosial Juliari Batubara yang memotong dana bantuan sosial kepada setiap masyarakat dengan masing-masing sebesar sepuluh ribu rupiah (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021). Selain itu, dugaan penggelapan dana bansos sekitar Rp1,338 Triliun pada kartu penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) se-Indonesia selama 3-12 bulan yang mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan bunga. KPK kemudian memberikan rekomendasi agar dilakukan perbaikan mekanisme BPNT yang memberi keleluasaan pembelanjaan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Perbaikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemsos dengan bank penyalur terkait mekanisme penyaluran BPNT dan PKH untuk menghindari pengendapan dana pada bank penyalur (Himbara). Di samping meningkatnya kasus korupsi di Indonesia, KPK juga berhasil meningkatkan penyelamatan aset negara akibat korupsi. Berdasarkan data yang ditampilkan KPK, jumlah keuangan negara Indonesia yang berhasil diselamatkan pada tahun 2020 mencapai Rp652,8 miliar (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja KPK mengalami peningkatan walaupun pandemi *COVID-19* sedang melanda.

Membongkar kasus korupsi juga menimbulkan dampak negatif bagi KPK sendiri. KPK mendapatkan ancaman berupa intimidasi verbal, dan serangan fisik hingga percobaan pembunuhan. Kasus ancaman serangan balik bagi KPK yang pernah terjadi adalah benda mirip bom ditemukan di kediaman Agus Rahardjo selaku ketua KPK, dan dua bom molotov dilemparkan ke kediaman Laode M. Syarif selaku ketua KPK laode. Tidak hanya itu, dua anggota tim surveillance KPK mendapatkan penganiayaan saat memantau informasi dugaan akan adanya penyuaipan di Hotel Borobudur, Jakarta Utara. Pada 11 April 2017, Novel Baswedan selaku penyidik KPK mendapatkan serangan fisik, yaitu disiram air keras. Akibatnya, mata kiri Novel Baswedan mengalami kerusakan sebesar 95% dan mengancam kebutaan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019).

PENUTUP

Penipuan atau *fraud* merupakan permasalahan serius yang sering terjadi hingga saat ini. *Fraud* macam cara yang dapat dirancang oleh kecerdikan manusia, dan yang digunakan oleh satu individu untuk mendapatkan keuntungan dari yang lain dengan saran palsu atau pemaksaan kebenaran. Organisasi membutuhkan proses yang kuat untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi *fraud* dan korupsi yang didukung oleh pemahaman yang kuat tentang risiko. Organisasi membutuhkan proses yang kuat untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi *fraud* dan korupsi yang didukung oleh pemahaman yang kuat tentang risiko. Mencegah *fraud* membutuhkan lebih sedikit sumber daya daripada pendekatan yang berfokus pada deteksi dan pemulihan.

Berdasarkan berbagai seluruh penelitian, kasus *fraud* baik Indonesia maupun Asia Pasifik yang juga dipicu oleh pengaruh pandemi *COVID-19* mengalami penurunan meskipun potensi terjadinya korupsi di Indonesia mengalami peningkatan karena adanya celah pada program pemerintah yang hendak memberikan dana bantuan sosial kepada masyarakat pasca pandemi *COVID-19*. Secara global, *fraud* diprediksi mengalami peningkatan yang dapat mengalami dampak buruk yang lebih besar baik secara finansial (kerugian finansial, mahal biaya kebutuhan teknologi baru yang terus beradaptasi, kegagalan operasional bisnis, dan sebagainya) maupun secara non-finansial (kerusakan reputasi, loyalitas pelanggan yang lebih rendah, dan terjadinya konsekuensi hukum yang terjadi). Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah adanya harapan dalam mengetahui informasi perbandingan berbagai dampak *fraud* yang secara luas pada sebelum dan sesudah terjadinya pandemi *COVID-19* antara Indonesia dan Asia Pasifik. Hal ini berguna bagi berbagai pihak baik badan publik dan masyarakat tentang pentingnya tindakan pencegahan *fraud* atau kecurangan supaya semua pihak dapat menghindari dampak kerugian tersebut dan lebih berwaspada terhadap terjadinya *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, F. (2021). Respon Internal Audit atas Dampak Pandemi Covid-19. *Akuntabilitas*, 15(2), 293–306.

Association of Certified Fraud Examiners. (2012). *Report to the Nations on*

Occupational Fraud and Abuse.

- Association of Certified Fraud Examiners. (2023). *Fraud 101: What Is Fraud?* Retrieved from <https://www.acfe.com/fraud-resources/fraud-101-what-is-fraud>
- Binus University. (2015). *Sistem Pengendalian Menurut COSO*. Retrieved from <https://accounting.binus.ac.id/2015/09/25/sistem-pengendalian-menurut-coso/>
- Christian, N., & Ricardo, P. (2022). Kajian Impact of Fraud: Nasional dan Internasional. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2). Retrieved from <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/1978>
- Christian, N., & Veronica, J. (2022). Dampak Kecurangan Pada Bidang Keuangan Dan Non-Keuangan Terhadap Jenis Fraud di Indonesia. Retrieved from Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana website: <https://ejournal.mercubuana-yogya.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/2401/992>
- Edi, & Victoria, E. (2018). Pembuktian Fraud Triangle Theory Pada Financial Report Quality. *Jurnal Benefita: Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 380–395. Retrieved from <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/854472>
- Indonesia Corruption Watch. (2021). *Perbaikan Tata Kelola yang Semu*. Retrieved from <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/LAT 2021 Indonesia.pdf>
- International Public Sector Fraud Forum. (2020). *Guide to Understanding the Total Impact of Fraud*. Retrieved from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/866608/2377_The_Impact_of_Fraud_AW_4_.pdf
- Juliana, L., Johari, R. J., Said, J., & Wondabio, L. S. (2021). The Effects of Tone at the Top and Professional Skepticism on Fraud Risk Judgment Among Internal Auditors in Indonesia. Retrieved from Research Gate website: [353941039_The_Effects_of_Tone_at_the_Top_and_Professional_Skepticism_on_Fraud_Risk_Judgment_Among_Internal_Auditors_in_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/353941039_The_Effects_of_Tone_at_the_Top_and_Professional_Skepticism_on_Fraud_Risk_Judgment_Among_Internal_Auditors_in_Indonesia)
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Laporan Tahunan KPK 2019*.

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). Laporan Tahunan KPK 2020. <http://pubs.sciepub.com/jbms/1/5/4/index.html>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). Laporan Tahunan KPK 2021.
- Kusumawardhani, P. (2013). Deteksi Financial Statement Fraud dengan Analisis Fraud Triangle Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 1(3). Retrieved from <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/2295>
- Mantinaf. (2020). Upaya Mendeteksi Kecurangan Fraud. Retrieved from <https://inspektorat.waykanankab.go.id/detailpost/upaya-mendeteksi-kecurangan-fraud>
- Mardianto, & Tiono, C. (2019). Analisis Pengaruh Fraud Triangle Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Benefita: Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 87–103. Retrieved from <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/909750>
- McKee, J. (2022). Customer experience: The true victim of fraud. Retrieved from 451 Alliance (Part of S&P Global Market Intelligence) website: <https://blog.451alliance.com/customer-experience-the-true-victim-of-fraud/>
- Nurohman, D., Aziz, A., & Fahmi, M. F. (2021). Skenario pertumbuhan ekonomi pasca covid-19 dan kondisi lembaga keuangan mikro syariah di tulungagung. *Kodifikasi Jurnal Penelitian Islam*, 15(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21154/kodifikasi.v15i1.2280>
- PricewaterhouseCoopers. (2022). PwC's Global Economic Crime and Fraud Survey 2022. Retrieved from <https://www.pwc.com/gx/en/services/forensics/economic-crime-survey.html>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.
- Warta Pemeriksa. (2020). Skandal Jiwasraya dan Nasib Hasil Audit BPK. Retrieved from <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=20834>
- Weeks, K., & Mileski, J. (2013). The Impact of Resource Commitment, Product Route Efficiency on Supply Chain Performance and Profitability: An Empirical Case Analysis. *Journal of Business and Management Sciences*, 1(5), 105–111. Retrieved from